

STRATEGI MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK DAN MENOLAK MONEY POLITIC PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KOTA MALANG

Dody Setyawan dan Ignatius Adiwidjaja

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Email: dodyuni3@gmail.com, ignatiusadiwidjaja@yahoo.com

ABSTRACT

First time voter is one of the important factors that cannot be ignored by political party in gain votes in the upcoming 2014 election. Estimated that there are about 22 million voters who will have the right to vote for the first time in the 2014 elections^[5]. Characteristics of first time voters, who “still fragile” or not independent in the decision to choose independently, become a space that must be touched by the political parties, which is suspected through money politics approach. Money politics although relatively hard to find evidence of cheating, but there is and can be traced through the testimony of the receiver^[5]. Strategy to increase political awareness and consciousness reject money politics first voters in elections and the 2014 presidential election, it is the primary and principal purpose of this study. This study use qualitative methods, with phenomenological perspective. The way to collecting data is by using interviews, and determination of informants using purposive sampling technique and subsequent snowball sampling. Data analysis performed by multilevel methods, namely: Group analysis of the content of the interview, group theme analysis, group case analysis, and groups supporting data. Analysis of the results of studies is using theoretical approaches Miles & Huberman. For the validity of the data, this study is using triangulation and peer debriefin. The result of the studi are; intensive socializations to high school are required because most of the voters are still in school, and we need to provide politic corner to make the voters easier in getting the election information.

Keywords: *Political Awareness, Money Politic, Voters, Election.*

PENDAHULUAN

Pemilih pemula (*first time voter*) merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan oleh Partai Politik (Parpol) dalam mendulang suara pada Pemilu 2014 yang akan datang. Karakteristik pemilih pemula yang “masih rentan” atau belum mandiri^[4] dalam pengambilan keputusan untuk memilih secara mandiri menjadi ruang tersendiri yang dapat disentuh oleh Parpol. Salah satu cara mendekati pemilih pemula adalah dengan *money politic*. *Money politics* tidak melulu identik dengan pemberian uang secara langsung namun dapat juga berupa sembako, iming-iming keuntungan, yang intinya dapat mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihan pada salah satu kandidat/ parpol tertentu.

Kriteria pemilih pemula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dalam pasal 1 disebutkan pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin^[5]. Hasil proyeksi penduduk umur tunggal oleh Lembaga Demografi FEUI dengan menggunakan basis data Sensus Penduduk 2010 (BPS) diperkirakan terdapat sekitar 22 juta pemilih yang akan memiliki hak pilih untuk pertama kalinya dalam pemilu 2014^[5].

Politik uang (*money politics*) selama ini telah menjadi bagian dari proses pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan legislatif yang akan datang, hingga pemilihan presiden, hampir dapat dipastikan, *money politics* akan terus mendapat ruang. Bentuknya pun amat beragam, mulai dari pembagian sembako, biaya transportasi

selama kampanye, hingga pembagian uang secara langsung, (Hamid, Kompasiana 24 Februari 2012)^[5]. Ditambah dengan penetapan calon anggota legislatif berdasarkan jumlah pemilih, hampir dapat dipastikan jumlah *money politics* akan meningkat pada pemilu 2014. ICW bahkan memprediksi angkanya akan mencapai tiga kali lipat dibandingkan Pemilu 2009 lalu^[5].

Money politics terjadi antara lain karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku yang dalam hal ini adalah partai, politisi, ataupun perantara lain, dan korban, dalam hal ini rakyat secara umum. Bagi politisi *money politics* merupakan media instan yang dengannya suara konstituen dapat dibeli dan diperoleh dengan mudah. Sebaliknya bagi rakyat, *money politics* ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dirasakan dibandingkan misalnya realisasi program-program partai atau politisi yang biasanya tidak menyentuh mereka secara langsung. Dengan kata lain bagi rakyat, *money politics* adalah satu-satunya mekanisme politik untuk mendapatkan kemanfaatan atas hak suara yang mereka berikan, (Muhtadi, 2013)^[1].

Hal penting yang menjadi masalah adalah bagaimana strategi advokasi untuk meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran menolak *money politics* dalam pemilu 2014 yang akan datang. Mengingat kontestasi dan persaingan yang sangat ketat antar calon yang akan mewakili rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlangsung pada bulan Juni sampai dengan November 2013 di Kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif fenomenologis (Sutopo, 2006)^[1], dalam arti bahwa hasil penelitian ini terjadi pada waktu dan kejadian saat penelitian berlangsung, bisa jadi diwaktu yang lain hal itu tidak terjadi.

Penentuan responden menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Instrumen utama dalam pengambilan data adalah interview dengan berpegang pada *Interview Guide* yang *favorable* (positif). Untuk kevalidan data, juga dilengkapi dengan observasi dan teknik dokumentasi (bibliografi), yaitu; untuk data yang bersifat tidak langsung yang meliputi data sekunder (dokumen resmi, makalah, artikel, jurnal, dan internet). Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode bertingkat, yaitu: kelompok analisis teks atau isi wawancara, analisis tema (analisis struktural), analisis kasus (studi kasus), dan data pendukung. Pembahasan dan analisis hasil penelitian menggunakan pendekatan teori Miles & Huberman^[1]. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi dan *peer debriefing*, Creswell^[1].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian di Kota Malang karena mewakili kelompok besar masyarakat Jawa Timur ditinjau dari aspek masyarakatnya, yaitu; metropolis, transisional, kota pendidikan dan tingkat kesadaran masyarakatnya cukup memadai dengan tingkatan yang bervariasi sesuai dengan kultur budayanya. Ada masyarakat pendatang yang sudah menetap dan juga ada masyarakat asli Kota Malang yang terkenal dengan sebutan Aremania.

Jumlah pemilih pemula yang masuk dalam data base pemilih pada Pemilihan Walikota Malang yang berlangsung tanggal 23 Mei 2013 sangat besar, sekitar 30% dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang telah ditetapkan KPUD Kota Malang. Total jumlah DPT 621.565 jiwa, sedangkan jumlah pemilih pemula sekitar 186.470. Besarnya potensi pemilih muda tersebut tentunya menjadi bidikan tersendiri bagi para tim sukses pada pemilu 2014.

Berdasarkan perilaku pemilih pemula pada Pilkada Kota Malang sebagai sebuah studi kasus ditemukan bahwa antusiasme pemilih pemula tidak begitu besar dan cenderung biasa-biasa saja. Adapun alasannya, mereka mengaku kebingungan dengan calon wali kota dan wakilnya juga dengan jumlah partai politik yang mengusungnya. Hal inilah faktor utama yang membuat pemilih pemula enggan dan kurang antusias berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang.

Sehubungan dengan evaluasi pada pilkada Kota Malang tersebut dan hasil dari wawancara dengan berbagai elemen masyarakat, ada beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula agar ikut dalam pagelaran lima tahun sekali pada tahun 2014 nanti. Pertama, yaitu dengan melakukan sosialisasi yang merata dan intensif ke sekolah-sekolah karena mayoritas pemilih pemula masih duduk dibangku sekolah menengah atas. Namun sosialisasi yang seharusnya menjadi tanggungjawab KPUD Kota Malang ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Ketua KPUD yang mengatakan bahwa KPUD adalah kepanjangan tangan dari KPU pusat, sehingga sosialisasi akan dilakukan apabila ada instruksi dari KPU Pusat karena menyangkut dengan dana dan biaya untuk melakukannya.

Kedua, untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula juga dapat dilakukan dengan adanya buku panduan yang seharusnya dikeluarkan oleh KPU, sehingga pemilih pemula pada khususnya mampu memahami pentingnya menggunakan hak suara bahwa ikut memilih berarti ikut menentukan masa depan lima tahun berikutnya. Namun lagi-lagi hal ini juga bergantung ada tidaknya dana yang dialokasikan oleh KPU untuk pengadaan buku panduan tersebut.

Ketiga, partisipasi politik pemilih pemula bisa didorong melalui media massa, artinya media massa harus menyajikan hal-hal yang positif tentang pemilu berikut dengan dinamika yang menyertainya. Pemberitaan yang positif terkait pentingnya berpartisipasi dalam politik, tugas dan fungsi partai politik dan profil para calon legislatif maupun calon presiden dan wakilnya yang akan bertarung pada 2014 yang akan datang secara proporsional. Selain itu berita yang berimbang baik yang bersifat kelembagaan (parpol, KPU, yang berkaitan erat dengan penyelenggara dan kontestan pemilu) maupun perorangan (sebagai kandidat dan sebagainya), dengan demikian harapannya terbangun paradigma masyarakat yang baik dan berimbang sehingga terbangun motivasi untuk menggunakan hak suaranya.

Keempat, strategi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula dapat dilakukan dengan *politic corner* yang dibuat atau dibentuk di tempat-tempat strategis terutama tempat yang sering dikunjungi remaja atau pemilih pemula, misalnya di mall dan tempat keramaian lainnya. Tujuannya mendekatkan segala sesuatu terkait informasi tentang penyelenggaraan pemilu 2014. Seperti jumlah partai politik, tata cara pencoblosan, jumlah calon anggota legislatif ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun nasional. Namun demikian ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab KPUD saja, melainkan dibutuhkan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli demokrasi dan masa depan Indonesia seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), salah satunya^[2].

Namun demikian, masyarakat khususnya pemilih pemula selain didorong untuk menggunakan hak suaranya dan berpartisipasi dalam pemilu mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran akan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan pada saat penyelenggaraan pemilu. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *money politic* yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih sehingga pilihannya tidak lagi berdasar pilihan-pilihan rasional melainkan karena pemberian. Pemberian yang ditemukan pada pilkada Kota Malang dapat berupa uang, sembako, *door price*, paket perjalanan wisata relegi, dan sebagainya.

Keterlibatan mereka sebagai penerima *money politic* merupakan bukti bahwa pendidikan politik yang mereka dapatkan masih amat jauh dari mencukupi, sehingga aspek keterwakilan yang terbuka dan transparan sebagai substansi demokrasi dipahami secara salah, (Stoker, 2011)^[1]. Rakyat belum sepenuhnya sadar bahwa janji politik yang dibalut *money politics* pada dasarnya merupakan eksploitasi hak-hak politik rakyat. Apalagi, dalam proses ini, sama sekali tidak terdapat akta politik yang menjamin rakyat mendapatkan implementasi janji setelah hak politiknya diambil. Dengan kata lain, rakyat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses politik ketika memberikan suaranya semata-mata berdasarkan *money politics*. Semakin banyak rakyat yang memberikan suaranya berdasarkan *money politics* menunjukkan semakin rendahnya kesadaran politik bangsa.

Oleh karena perbuatan *money politic* tersebut maka harus ada strategi yang perlu dilakukan untuk menolak *money politic*, diantaranya pertama; sosialisasi tentang penggunaan hak suara yang

dibarengi dengan penjelasan bahaya *money politic*. Sosialisasi ini sangat penting bagi pemilih pemula mengingat dampaknya berpengaruh terhadap perilaku jangka panjang. Apabila pada “kesan pertama” mengikuti pemilu kemudian mereka mendapati bahwa kalau pemilu itu mendapatkan sesuatu berupa berbagai bentuk *money politic*, maka sesungguhnya kita secara tidak langsung akan menanamkan atau menurunkan budaya, atau pembiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar norma hukum. Bahkan norma agama, seperti dalam agama Islam siapa yang menyuap dan yang menerima sama-sama berdosa.

Kedua, dapat dilakukan dengan membentuk forum yang berfungsi mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu atau pemilukada. Selain Bawaslu ditingkat provinsi dan panwaslu ditingkat Kabupaten/ Kota, sesungguhnya kontrol masyarakat sipil sebagai sebuah bentuk “*pressure*” tersendiri bagi pelaku kecurangan dalam pemilu. Manfaat lain dari pembentukan forum masyarakat sipil ini sesungguhnya sebagai sebuah proses pendidikan politik dan partisipasi aktif bagi masyarakat agar membiasakan melibatkan diri dalam menentukan masa depan pembangunan bangsa dan negara.

Ketiga, strategi untuk menolak *money politic* juga dapat dilakukan dengan game pemilu. Dalam arti kata game dilakukan dengan cara memberikan *reward* (hadiah) kepada masyarakat yang berhasil meluput kecurangan-kecurang pemilu khususnya perbuatan *money politic* lengkap dengan barang buktinya. Dengan demikian akan menjadi sebuah pertimbangan alternatif bagi pemilih yang tergiur mendapatkan sesuatu dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Kalau menerima dari orang yang menginginkan suara itu merupakan perbuatan yang mencederai demokrasi, maka alangkah lebih baiknya melaporkan perbuatan curang kepada Bawaslu atau Panwaslu. Toh sama-sama mendapatkan “sesuatu”, bedanya yang satu amoral sedangkan yang lain membantu mengungkap kecurangan dalam pemilu.

Keempat, ini yang menjadi pamungkas dari semua pendapat dan temuan dalam penelitian untuk memberangus praktek *money politic* adalah pemberian sanksi yang tegas terhadap partai politik baik secara kelembagaan atau perorangan (orang dari parpol atau tim sukses kandidat) yang terbukti melakukan *money politic*. Sehingga para oknum yang melakukan kecurangan dengan melakukan pemberian yang dapat mempengaruhi pilihan seseorang (*money politic*) menjadi jera dan dapat diantisipasi secara maksimal.

Secara umum sistem berbangsa dan bernegara yang dipilih oleh Indonesia yakni demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Namun terkadang demokrasi ini melahirkan banyak celah yang disalahgunakan demi kepentingan-kepentingan individu. Dorongan yang terus dilakukan kepada masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam menggunakan hak suara tentunya juga harus diimbangi dengan strategi menolak berbagai bentuk praktek kecurangan seperti penjelasan sebelumnya. Namun demikian, masyarakat juga perlu diberi pemahaman akan bentuk dan modus atau penyebab terjadinya *money politic* tersebut agar dapat mengantisipasi secara dini dan menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji.

Motivasi pemilih dalam pemilu yang terlanjur dan pernah melakukan *money politic* disebabkan beberapa hal. Pertama; berbagai responden menilai bahwa masyarakat kurang siap dalam menjalankan demokrasi yang utuh dan secara dewasa. Demokrasi yang menjamin kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan berdasarkan nurani masing-masing. Kedua, perilaku *money politic* didorong karena hukum yang ada belum mampu memberikan ketertiban dan kurang ditegakan. Sehingga pelanggaran-pelanggaran termasuk *money politic* dalam perebutan penggunaan hak suara terus terulang dan subur. Ketiga, kurang efektifnya Bawaslu atau Panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilu di lapangan. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan seringkali tidak terdeteksi, sehingga berlalu begitu saja.

Keempat, masyarakat Indonesia dalam menjalankan demokrasi masih dinilai kurang memperhatikan hak-hak orang lain. Artinya ketika ada oknum partai politik dengan cara-cara tertentu mempengaruhi pilihan seseorang dalam menggunakan hak suaranya, maka hal dianggap biasa saja.

Kelima, faktor dominan yang membuat orang mau menerima dan beranggapan biasa saja melihat dan terlibat dalam praktek *money politic* adalah “aji mumpung”. Alasan utamanya pemilu hadir tidak setiap hari, tidak setiap tahun, melainkan lima tahun sekali. Oleh sebab itu mumpung ada kesempatan (ada pemberi) dan peluang (lemahnya pengawasan) maka perbuatan tersebut (pemberian dalam bentuk apapun) justru “diminta dan diharapkan” dengan terang-terangan oleh pemegang hak suara. Dengan demikian nampaknya untuk pemilu 2014 yang sudah didepan mata bukan mustahil *money politic* tetap menemukan momentumnya.

KESIMPULAN

Kesimpulannya bahwa strategi untuk meningkatkan partisipasi politik khususnya pada pemilih pemula perlu diadakannya sosialisasi tentang pemilu ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman yang merata terhadap pemilih pemula. Kedua, melalui buku-buku panduan atau brosur yang menjelaskan secara singkat dan tepat masalah pemilu. Ketiga, dukungan media massa yang selalu menyajikan hal-hal yang positif terkait calon atau kandidat yang akan berkompetisi. Keempat, *politic corner* yang dapat ditempatkan di lokasi strategis yang potensial dikunjungi pemilih pemula.

Sedangkan untuk menolak praktek *money politic*, dapat ditarik kesimpulan, yaitu; dengan memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada pemilih pemula bahwa *money politic* adalah perbuatan yang mencederai demokrasi dan merupakan akar dari korupsi. Kedua, membentuk forum muda-mudi untuk terlibat dalam pemantauan dan pengawasan jalannya pileg dan pilpres. Sedangkan selanjutnya adalah ditegakannya hukum dalam memberikan sanksi kongkrit bagi pelaku *money politic* agar memberikan efek jera. Terakhir game pemilu, dengan tujuan siapa yang melaporkan adanya perbuatan *money politic* dapat hadiah dan dijamin kerahasiannya, sehingga ada alternatif pilihan lebih baik dapat hadiah daripada dapat *money politic*.

Adapun terjadinya *money politic* berdasarkan adalah kesiapan masyarakat pada umumnya dan khusus pemilih pemula yang kurang matang dalam menjalankan demokrasi yang sehat, hukum kurang ditegakan, lembaga pengawas yang tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal, dan terakhir adalah “aji mumpung” mendapatkan sesuatu dari para calon yang bertarung memperebutkan hak suara pemilih pemula.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Ketua LPPM dan tim monev internal maupun eksternal. Terakhir terimakasih kepada seluruh anggota KPUD dan Panwaslu Kota Malang, kemudian sekolah menengah atas yang bersedia menjadi mitra dalam penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John, W., 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Muhtadi, Burhanuddin, 2013. *Perang Bintang 2014, Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Stoker, Gerry dan David Marsh, 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

- Setyawan, Dody. *Peran Civil Society sebagai Pressure Group dalam Perumusan Kebijakan Publik: Studi pada Malang Corruption Watch*. Diterbitkan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. Volume 01 Nomor 1, Hal. 12-18.
- Suhartono, 2009. “*Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)*”. Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI.
- Kompasiana, Hayesta F. Imanda, 16 April 2012.
- Kompasiana, Edy Suandi Hamid, 24 Februari 2012.
- Kompas, Kolom Opini, 29 Januari 2013.
- UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.